

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2019). *Kemenkeu Harap Penerimaan Pajak dari UMKM Meningkat*. diakses tanggal 11 November 2021. dari <https://jdih.bpk.go.id/?p=57755>
- BPS Kota Madiun. (2022). *Madiun dalam Angka 2022*.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach* (Sixteenth edition). Pearson.
- Diamastuti, E. (2018). Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 321/PJ/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak*.
- Fajariana, D. E., & Untari, D. (2019). Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Wisata Kuliner Malam Gultik (Gulai Tikungan) Blok M Jakarta Selatan. *Ekono Insentif*, 13(1), 1–15.
- Fatimah, F., & Tyas, W. M. (2020). Strategi Bersaing UMKM Rumah Makan Di Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2), 245–253. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i2.3663>
- Fitriandi, P. (2021). *Kupas Tuntas PPh Orang Pribadi*. Unit Penerbitan Politeknik Keuangan Negara Stan.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2), 27–42.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.
- Kementerian Keangan Republik Indonesia. (2017a). *Peraturan Menteri Keuangan 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Kementerian Keuangan.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017b). *Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. diakses tanggal 11 November 2021. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- KPP Pratama Madiun. (2022). *Profil KPP Pratama Madiun*. KPP Pratama Madiun.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Mailindah, Y. (2017). *Analisis Tingkat Pengukuran Keberhasilan Dan Hambatan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Sidoarjo* [Undergraduate, University of Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/36466/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV Andi Publisher.
- Mintanto, R. S. (2017). *Perancangan Informasi Kawasan Kuliner Malam Di Tangerang* [Skripsi]. Universitas Multimedia Nusantara.
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improve Tax Compliance*. Center For Tax Policy and Administration.
- OECD. (2010). *Understanding and Influencing Taxpayers' Compliance Behaviour*.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa*. 28.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang UU 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008a). *Undang-Undang UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008b). *Undang-Undang UU 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang*

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang UU 7 TAHUN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.* Pemerintah Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Madiun. (2022). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun 2021.* Pemerintah Kota Madiun.

Pramesthi, S. L. (2019a). *Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan atas UMKM Makanan di KPP Pratama Bandung Karees [KTTA].* Politeknik Keuangan Negara STAN.

Pramesthi, S. L. (2019b). *Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan atas UMKM Makanan di KPP Pratama Bandung Karees [KTTA].* Politeknik Keuangan Negara STAN.

Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(2), 456–473.

Pratiwimba, H. S. (2020). *Tinjauan atas Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Sektor Usaha Makanan dan Minuman di KPP Pratama Bantul [KTTA].* Politeknik Keuangan Negara STAN.

Rahayu, S. K. (2010). *Pepajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Graha Ilmu.

Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, 1(1), 1–17.

Setiawan, M. U. (2021). *Tinjauan atas Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Sektor Usaha Makanan dan Minuman saat Pandemi Covid 19 di KPP Pratama Yogyakarta [KTTA].* Politeknik Keuangan Negara STAN.

Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan Self Assessment System. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9882>

Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.*

Stewart, J. (2004). The Meaning of Strategy in the Public Sector. *Australian Journal of Public Administration*, 63(4), 16–21. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2004.00409.x>

- Suhendra, E. S. (2011). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 15(1), Article 1.
- Tempel, A. J. van den, & Langen, W. J. de. (1959). *De grondbeginselen van het Nederlandse belastingrecht, dl.II [door] W.J. de Langen: Boekbespreking*. Muusses.
- Torgler, B. (2003). To Evade Taxes or Not to Evade: That Is the Question. *The Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283–302. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(03\)00040-4](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00040-4)
- Ulfa, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1254>
- Yuyun. (2010). *38 Inspirasi Usaha Makanan Minuman untuk Home Industry Modal di Bawah 5 Juta*. PT AgroMedia Pustaka.
- Zamzami, M. (2021). *Tinjauan Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Makanan di KPP Pratama Kotabumi [KTTA]*. Politeknik Keuangan Negara STAN.